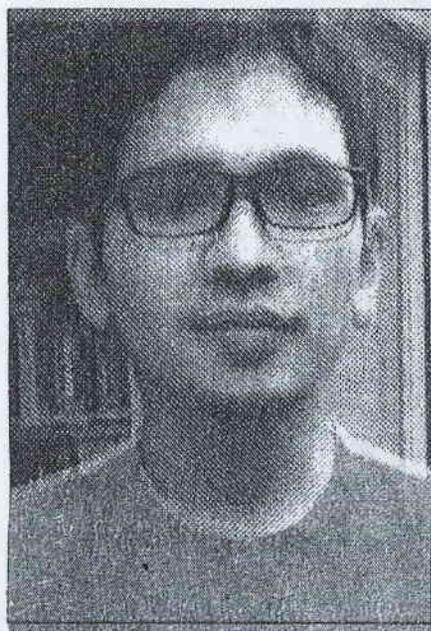


Melawan Tirani Mayoritas DPR



HALILI

Koordinator Lingkaran Kajian Demokrasi dan HAM FIS Universitas Negeri Yogyakarta

ARUS mundur demokratisasi di Indonesia tampaknya sulit dicegah, jika Koalisi Merah Putih tetap mempertahankan “banting setir” pilihan politiknya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung. Dalam beberapa hari ini, dinamika politik belum berubah. Partai-partai Koalisi Merah Putih, yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Rajasa, *ngotot* dengan opsi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Arus mundur tersebut bisa dibaca dari beberapa parameter. Pertama, Pilkada secara langsung merupakan konsekuensi dari desentralisasi yang berhilir pada otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan ruang politik (*political space*) sebesar-besarnya kepada daerah untuk mengelola pemerintahan di tingkat lokal.

Ruang politik tersebut tidak semata disediakan untuk penyelenggara pemerintahan daerah tetapi juga untuk rakyat, demi melakukan ekstensifikasi partisipasi melalui pemilihan kepala pemerintahan daerah, pengawasan, dan kontrol publik. Dengan demikian, upaya politik untuk memangkai salah satu saluran partisipasi

■ Bersambung ke Hal 1

TribunOpini menerima kiriman artikel opini tentang beragam isu populer lokal, regional, maupun nasional. TribunOpini tayang setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Panjang artikel 3.000 karakter atau sekitar 525 kata. Kirim naskah via email : tribunopini@gmail.com, sertakan foto dan identitas diri Anda.

rakyat dalam menentukan kepala daerahnya jelas sebuah kemunduran.

Kedua, Pilkada langsung yang mulai diadopsi di Indonesia sejak tahun 2005 mendorong kemandirian politik di tingkat lokal. Di era Pilkada langsung, kemandirian politik lokal, yang sebelumnya dipasung oleh sentralisasi politik rezim Soeharto, perlahan-lahan mulai tumbuh. Pendidikan politik secara lebih masif di kalangan masyarakat sipil berkembang sebagai *sine qua non* (hal yang harus ada, **Red**). Hasilnya, literasi politik akar rumput mulai meningkat.

Belakangan, masyarakat memanen buah dari transformasi politik pemilihan kepala daerah. Pada masa pemilihan kepala daerah oleh DPRD, rekrutmen pemimpin lokal berbasis elitisme dan oligarki, bahkan primordialisme. Setelah Pilkada dilakukan secara langsung, populisme membaik, oligarki mulai mencair, dan simpul-simpul orang kuat lokal pun mulai terurai. Implikasinya, muncullah pemimpin-pemimpin meritokrat dengan integritas dan kapabilitas eksekelen, seperti Joko Widodo, Herry Zudianto, Ridwan Kamil, Basuki Tjahja Purnama, dan Tri Rismaharini.

Jika ruang kontestasi Pilkada ditarik lagi ke laci-laci meja anggota DPRD, maka akan terjadi kemunduran politik di tingkat lokal. Elitisme, oligarki, dan primordialisme politik akan kembali menguat.

Politik uang

Ketiga, *voluntarisme* politik

di tingkat lokal semakin meningkat. Meskipun politik uang belum lenyap, akan tetapi Pilkada secara langsung mendedahkan fakta semakin dewasanya publik dalam merespons fenomena politik uang.

Kalau pada masa lalu politik uang merupakan sesuatu yang menjamur secara terbuka melalui serangan fajar, maka pada fase perkembangan Pilkada langsung mulai berkembang gerakan akar rumput "Ambil uangnya, jangan pilih orangnya!". Gerakan demikian semakin maju dan bertransformasi menjadi "Tolak uangnya, dan jangan pilih orangnya!" Bahkan dalam beberapa proses elektoral sepanjang 2014, terdapat beberapa daerah setingkat RT dan RW berani mencanangkan gerakan "Kampung bebas politik uang" atau "Kampung antiserangan fajar". Saya yakin, iklim dan kualitas Pilkada langsung akan semakin steril dari politik uang dengan semakin meningkatnya literasi politik masyarakat.

Bila kita cermati, mahalannya Pilkada dari sisi pengeluaran kontestan, sejatinya lebih banyak disebabkan oleh besarnya ongkos partai politik, seperti mahar politik, mas kawin politik, "oli" mesin partai, dan biaya iklan politik sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu dan praktik *marketing* politik.

Mengacu pada beberapa parameter tersebut, tidak ada alasan substantif untuk mengganti Pilkada Langsung dengan Pilkada oleh DPRD. Jika Koalisi

pendukung Prabowo-Hatta Raja-sa memaksakan perubahan tersebut, maka hal itu hanya mempertegas bahwa mereka adalah para *demagog*, musuh demokrasi, sebagaimana pernah penulis uraikan di harian ini pada 19 Agustus lalu.

Kisruh perubahan UU Pilkada sesungguhnya satu tarikan nafas dengan kontroversi perubahan UU MD3 sehari sebelum Pilpres, upaya membangun ketidakpastian hasil Pilpres, dominasi Pimpinan Pansus Tatib DPR, dan kemungkinan "permainan" sidang paripurna DPRD DKI tentang pengunduran diri Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Semua itu adalah ekspresi egoisme politik Koalisi yang menguasai sekitar 63% suara DPR, bukan tawaran transformasi politik baru untuk kepentingan bersama rakyat. Pamer soliditas yang mereka dengung-dengungkan hingga kini mengindikasikan bahwa manuver politik mereka akan terus berlanjut.

Untuk itu, rakyat harus me-waspada dan menolak upaya penjungkirbalikan demokrasi melalui arena politik DPR. Kontrol publik harus terus menyala. Media seyogyanya menggiatkan fungsi pengawas (*watchdog*). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penguji konstitusionalitas produk legislasi DPR harus dioptimalkan. Bahkan di titik sangat kritis tertentu, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mesti berani membuka jalan referendum publik untuk melawan tirani mayoritas DPR. (*)